



Pembentukan Badan Intelijen Maritim Guna Mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Widyanto Pudyo P

Program Doktor Studi Ketahanan Nasional, Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

Email : widhi9843al@gmail.com

Abstrak

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan untuk menjadikan negara ini sebagai poros maritim dunia, namun keberadaan badan intelijen maritim di negara kepulauan ini masih belum jelas. Intelijen maritim bukan merupakan bagian dari intelijen negara mengacu pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2011. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi yang dapat diberikan jika intelijen maritim mendapatkan pengakuan dari pemerintah, terutama untuk membantu pemerintah dalam merevitalisasi budaya maritim. sebagai salah satu dari lima pilar utama Indonesia untuk menjadi tumpuan maritim dunia. Mengenai budaya bahari di Indonesia, orang awam akan naif berpikir bahwa secara otomatis akan menjadi identitas nasional bangsa Indonesia, mengingat negara ini adalah negara kepulauan dan nenek moyang Indonesia dikenal sebagai pelaut tangguh yang telah menaklukkan lautan. Namun, kolonialisme dan alasan politik di masa lalu telah menyebabkan Indonesia begitu lama mengabaikan banyak potensi yang berasal dari kekayaan sumber daya maritimnya. Setelah melakukan studi pustaka dan menginterpretasikan data-data lama yang diperoleh selama studi pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan komunitas intelijen maritim tentunya dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi program pengembangan kembali budaya maritim di Indonesia melalui tiga fungsi utamanya: investigasi, kontra- intelijen dan psy-war untuk menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan bagi budaya maritim di Indonesia untuk mendapatkan kembali tempat dan keberadaannya dalam kehidupan berbangsa untuk mewujudkan cita-citanya menjadi poros maritim dunia.

Kata Kunci: *Maritim, Budaya, Intelijen*

Abstract

Although the Indonesian government has taken a policy to make this country the world's maritime axis, the existence of a maritime intelligence agency in this archipelagic country is still unclear. Maritime intelligence is not part of state intelligence referring to Law number 17 of 2011. Therefore, this study was conducted to determine the contribution that can be made if maritime intelligence gets recognition from the government, especially to assist the government in revitalizing maritime culture. as one of the five main pillars of Indonesia to become the world's maritime pedestal. Regarding maritime culture in Indonesia, ordinary people will be naive to think that it will automatically become the national identity of the Indonesian nation, considering that this country is an archipelagic country and Indonesia's ancestors were known as tough sailors who conquered the seas. However, colonialism and political reasons in the past have caused Indonesia for so long to ignore the many potentials that come from its wealth of maritime resources. After conducting a literature study and interpreting the old data obtained during the literature study, it can be concluded that the existence of the maritime intelligence community can certainly make a valuable contribution to the maritime culture

redevelopment program in Indonesia through its three main functions: investigation, counter-intelligence and psychology. war to create certain favorable conditions for maritime culture in Indonesia to regain its place and existence in the life of the nation to realize its ideals of becoming the world's maritime axis.

Keywords: *Maritime, Culture, Intelligence*

PENDAHULUAN

Sejak November 2014, pada KTT Asia Timur ke -9, saat Joko Widodo masih menjabat sebagai presiden pertama kali, pemerintah Indonesia bertekad menjadikan negara ini sebagai poros maritim dunia. Mendengar harapan sebesar itu, masyarakat mungkin bertanya-tanya tentang alasan dan mekanisme yang akan ditempuh pemerintah untuk mewujudkan impian tersebut. Dua alasan utama untuk memiliki harapan yang fantastis tersebut adalah bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi poros maritim dunia, terutama posisinya yang strategis di tengah perdagangan global dan kekayaan sumber daya alamnya. Selain itu, bangsa Indonesia kini sadar bahwa selama ini telah melupakan banyak potensi yang berasal dari sumber daya maritimnya untuk membangun negara untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi nasional dan menjadi poros maritim global sekaligus. waktu. Adapun jalan yang akan ditempuh untuk mewujudkan mimpi tersebut adalah dengan fokus pada 5 pilar utama sebagai program pembangunan yang perlu dilaksanakan secara konsisten. Kelima pilar utama tersebut adalah: (1) membangun budaya bahari Indonesia dalam rangka mengingatkan bangsa bahwa jati diri, kemakmuran, dan masa depannya pada prinsipnya ditentukan oleh cara negara mengelola lautnya; (2) menjaga laut dan sumber daya kelautan, dengan fokus membangun kedaulatan hasil laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; (3) mengutamakan pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, industri logistik dan perkapalan, serta pariwisata bahari; (4) memperkuat diplomasi maritim, kerjasama di bidang maritim, menghilangkan sumber konflik di laut seperti illegal fishing, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut; dan (5) membangun kekuatan pertahanan laut untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan laut serta yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan keamanan laut.

Dilihat dari susunan lima pilar utama tersebut, revitalisasi budaya bahari menjadi prioritas utama. Menurut Grondona, Harrison dan Huntington (2000) budaya merupakan faktor penting yang dapat membantu menjelaskan berbagai tingkat keberhasilan laju pembangunan. Budaya juga telah dilihat sebagai pengaruh besar dalam pembentukan peradaban. "Peradaban adalah entitas budaya" (Huntington, 1996). Budaya bahari harus dianggap sebagai identitas nasional Indonesia yang dapat menciptakan dan memperkuat solidaritas antar sesama bangsa dan mempersatukan anggota negara yang beragam. Namun demikian, budaya bahari seakan semakin memudar dari kehidupan masyarakat di negara kepulauan ini karena selama ini Indonesia lebih banyak fokus pada pembangunan sektor agraria daripada pembangunan sektor kelautan. Oleh karena itu, pemerintah memandang sudah saatnya pembangunan kembali budaya bahari di Indonesia dilakukan untuk mendukung ambisi globalnya.

Tak perlu dikatakan bahwa rencana besar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia perlu didukung oleh semua elemen yang merupakan kekuatan nasional Indonesia, termasuk komunitas intelijen. Namun, bahkan setelah 8 tahun komitmen untuk menjadi poros maritim dunia telah dicanangkan, hingga saat ini belum ada tanda yang jelas untuk secara resmi membentuk badan intelijen maritim yang bertanggung jawab untuk melakukan pengumpulan informasi di domain maritim. untuk mendukung pemimpin nasional dalam proses pengambilan keputusan di negara kepulauan ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji pentingnya memiliki badan intelijen

maritim untuk mendukung cita-cita pemerintah Indonesia menjadi poros maritim dunia, dengan perhatian khusus untuk membantu menghidupkan kembali budaya maritim sebagai pilar pertama dari 5 pilar utama untuk mewujudkan harapan tersebut. . Mengapa kita harus melibatkan komunitas intelijen dalam pembangunan kembali budaya maritim? Pertanyaan tersebut mungkin dapat dijawab dengan baik oleh pernyataan Sherman Kent sebagai berikut: *“Intelijen tidak mengklaim tidak akan pernah salah dalam prediksinya. Intelijen hanya berpendapat bahwa jawaban yang diberikannya adalah perkiraan yang paling mendalam dan objektif dan dipertimbangkan dengan cermat”*. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi yang dapat diberikan oleh badan intelijen maritim di Indonesia untuk membantu pemerintah dalam revitalisasi budaya maritim di Indonesia untuk mendukung mimpi negara menjadi poros maritim global. Karena dapat diamati dengan jelas saat ini bahwa budaya bahari semakin memudar dari kehidupan bangsa Indonesia.

Menurut Sumarno, Wisnu, Rojil Nugroho Bayu Aji (2018) berpendapat bahwa sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) oleh penguasa kolonial Belanda selalu dipandang negatif dalam sejarah Indonesia, yaitu sebagai bentuk penindasan terhadap rakyat dengan sistem wajib untuk menanam tanaman tertentu yang berlaku di pasar Internasional, khususnya Eropa. Sistem tanam paksa juga diikuti dengan kebijakan kerja paksa yang menambah kesengsaraan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, kebijakan tanam paksa dapat dimaknai kembali sebagai model kebijakan dengan model penanaman wajib menggunakan konsep baru yang disebut produk unggulan daerah. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor maritim telah diabaikan baik oleh penguasa Kolonial Belanda maupun oleh pemerintah Indonesia sebelumnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Badan Intelijen Maritim Untuk Mengembalikan Kejayaan Budaya Maritim

1. Badan Intelijen Maritim

Menurut pengamat intelijen Indonesia, Susaningtyas NH Kertopati (2016), istilah intelijen maritim bukanlah sesuatu yang baru, sudah ada sejak lama, dan istilah tersebut mendapatkan popularitas baru dalam menyambut visi poros maritim global. Ia menilai badan intelijen maritim perlu dibahas lebih lanjut karena lembaga pemerintah Indonesia yang akan melakukan deteksi dini terhadap ancaman di wilayah laut Indonesia. Ia meyakini keberadaan badan intelijen maritim dapat meminimalisir eskalasi ancaman terhadap negara lain. Ditambahkannya, eskalasi ancaman yang selalu berfluktuasi dan zona maritim Indonesia yang tumpang tindih dengan negara lain tentunya membutuhkan kehadiran intelijen maritim. Ia menyarankan badan intelijen maritim Indonesia ke depan tetap beroperasi secara integral di dalam Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memastikan koordinasi yang baik. Keberadaan badan intelijen maritim tidak lepas dari tata kelola maritim yang baik dan harus ada korelasi yang jelas dengan kinerja BIN yang bertindak sebagai koordinator kegiatan badan intelijen di Indonesia.

Menurut Kusnanto Anggoro (2016), pengamat politik dan militer dari CSIS, pembentukan badan intelijen maritim Indonesia perlu dibahas kembali dan dikorelasikan dengan undang-undang intelijen yang ada agar penamaannya tidak bias. Ia menilai perlu ditegaskan, siapa yang akan menjadi aktor dan peran apa yang akan dimainkannya. Dalam konteks poros maritim dunia, intelijen maritim lebih baik ditempatkan di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dimana intelijen maritim berfungsi sebagai sumber daya preventif. Sedangkan jika intelijen maritim ditempatkan di bawah BIN, maka akan berfungsi sebagai kontra intelijen.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dalam Bab 1 disebutkan bahwa intelijen adalah pengetahuan, pengorganisasian, dan kegiatan yang dikaitkan dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang dikumpulkan melalui cara kerja

deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penyangkalan dan penanggulangan segala ancaman terhadap keamanan nasional.

Memang patut diakui tidak ada yang namanya intelijen maritim dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara. Selama ini intelijen maritim di Indonesia belum dimasukkan sebagai bagian dari intelijen negara. Namun untuk keperluan penelitian ini, dengan mengacu pada beberapa informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, dapat ditarik kesimpulan mengenai intelijen maritim, yaitu intelijen yang bekerja di ranah maritim, cakupannya lebih besar dari intelijen angkatan laut dan melakukan bisnis yang hampir sama. sebagai cabang intelijen lainnya: aktivitas pengumpulan, pemrosesan, analisis, produksi, dan penyebaran semua sumber intelijen (Humint, Techint, Masint, Sigint, Osint, Geoint, dan CI) untuk mendukung pengguna atau konsumen dalam membuat keputusan sebaik mungkin. Kegiatan intelijen maritim di Indonesia selama ini telah dilakukan oleh beberapa kementerian dan lembaga pemerintah, antara lain: TNI Angkatan Laut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Kelautan dan Udara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kelautan Perhubungan, Badan Keamanan Laut dan Industri Maritim. Oleh karena itu, badan intelijen maritim akan dirujuk lebih lanjut dalam bahasan selanjutnya sebagai komunitas intelijen maritim.

Berkaitan dengan agenda menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, komunitas intelijen maritim di Indonesia sebagai salah satu elemen bangsa harus dapat mendukung karya-karya raksasa tersebut menuju pencapaian kebijakan pemerintah tersebut, terutama realisasi yang pertama dari lima kebijakan tersebut. pilar utama, yaitu membangun kembali atau merevitalisasi budaya bahari Indonesia. Mengingat komunitas intelijen sebagai garda pertama pertahanan negara, komunitas intelijenlah yang harus pertama kali mengidentifikasi penurunan nilai budaya maritim dari kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan merupakan tugas komunitas intelijen juga untuk memberikan peringatan kepada para pemimpin nasional sebagai pengguna tentang bahaya kehilangan identitas sebagai bangsa maritim.

2. Budaya Maritim

Center for Advanced Research on Language Acquisition (CARLA) di University of Minnesota, AS, mendefinisikan budaya sebagai pola perilaku dan interaksi bersama, konstruksi kognitif, dan pemahaman yang dipelajari melalui sosialisasi. Dengan demikian, budaya dapat dilihat sebagai pertumbuhan identitas kelompok yang dipupuk oleh pola-pola sosial yang unik bagi kelompok tersebut. Menurut Cristina De Rossi, antropolog di Barnet and Southgate College di London, budaya mencakup agama, makanan, apa yang kita kenakan, bagaimana kita memakainya, bahasa kita, pernikahan, musik, apa yang kita yakini benar atau salah, bagaimana kita duduk. meja, bagaimana kita menyapa pengunjung, bagaimana kita berperilaku dengan orang yang kita cintai, dan perilaku-perilaku lainnya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2011 : 879), kata “maritim” berarti: (1) segala sesuatu yang berhubungan dengan laut, dan (2) yang berkaitan dengan laut. navigasi dan perdagangan di laut. Secara etimologis, kata “maritime” berasal dari bahasa latin, “mare” yang berarti laut. Identitas adalah gambaran tentang keberadaan dan rasa memiliki. Identitas terdiri dari dua pilar: pengenalan dan diidentifikasi (Eralp 1997). Individu diidentifikasi sebagai 'diri' dan masyarakat adalah pengidentifikasi utama sebagai 'orang lain'. Identitas merupakan fenomena sosial yang dimulai dengan proses pembentukan identitas melalui interaksi dengan 'yang lain' atau melawan 'yang lain'. Seseorang cenderung menginternalisasi dan mempraktikkan perilaku, nilai, dan norma masyarakat tempat dia tinggal. Côté & Levine (2002) menyatakan bahwa orientasi budaya dapat mempengaruhi pendekatan pembentukan identitas. Misalnya, masyarakat dengan orientasi budaya individualistis akan cenderung mengedepankan pembentukan identitas melalui

eksplorasi dan mengutamakan pengembangan diri. Namun, masyarakat dengan orientasi budaya kolektif akan cenderung mempromosikan pembentukan identitas dengan keanggotaan kelompok dan memprioritaskan saling ketergantungan antar individu (Bosma & Kunnen, 2001).

Model Tiga Tahap Pengembangan Identitas Etnis yang dikembangkan Jean S. Phinney adalah pandangan yang diterima secara luas tentang pembentukan identitas budaya yang terdiri dari:

Tahap 1: Identitas Etnis yang Belum Diperiksa;

Pada tahap ini individu belum mengeksplorasi etnisitasnya. Beberapa siswa minoritas mungkin awalnya menerima nilai dan sikap dari budaya mayoritas. Individu tidak mengamati masalah sendiri dan mengambil nilai dan pendapat orang lain tanpa bertanya.

Tahap 2: Pencarian Identitas Etnis;

Tahap ini merupakan pusat pengembangan identitas etnis (periode eksplorasi). Individu mencapai tingkat ini ketika mereka menemukan situasi yang menyebabkan mereka mengeksplorasi identitas etnis mereka.

Tahap 3: Pencapaian Identitas Etnis

Tahap ini ditandai dengan penerimaan, internalisasi, dan pemahaman yang jelas tentang etnis seseorang. Ini adalah tahap di mana individu menerima perbedaan budaya antara kelompok etnis seseorang dan budaya mayoritas. Tahap ini mewakili hasil ideal dari proses identitas.

Jika anggota satu negara-bangsa/negara dengan keragaman etnis yang tinggi seperti Indonesia memiliki rasa identitas nasional yang lebih kuat daripada identitas etnisnya, maka identitas nasional dapat memoderasi dampak konflik etnis. Sejalan dengan itu, identitas nasional dapat menjadi kekuatan pemersatu atau inklusi yang dapat meredam konflik etnis (Transue, 2007).

METODE

Artikel ini ditulis dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman publik yang ada tentang ada atau tidaknya badan intelijen maritim di Indonesia dan apakah kelompok tersebut dapat mendukung impian Indonesia menjadi poros maritim dunia dengan merevitalisasi budaya maritimnya. yang dianggap memudar dari masyarakat kontemporer Indonesia. Jika hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa badan intelijen maritim diperlukan untuk memberikan kontribusi yang berharga bagi pencapaian impian bangsa Indonesia, maka mungkin pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan badan tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis memanfaatkan data bekas yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara bertahap, pertama, tahap pengumpulan data yang sudah dimulai bahkan sejak awal penyelidikan; kedua, fase kondensasi data yang terdiri dari meringkas, memfokuskan pada hal-hal penting untuk mendapatkan tema dan polanya untuk mendapatkan deskripsi yang lebih baik dan memungkinkan penulis untuk mendapatkan data tambahan jika diperlukan; ketiga, tahap tampilan data untuk melihat hubungan antar kategori dengan menggunakan teks naratif; dan terakhir, fase penarikan kesimpulan. Hasil investigasi bersifat eksploratif untuk mengidentifikasi, menghitung dan menguraikan masalah atau pertanyaan penelitian, terutama mengenai peran yang dapat dilakukan oleh badan intelijen maritim untuk membantu pemerintah Indonesia menjadikan negara kepulauan sebagai tumpuan maritim global dengan kembali -mengembangkan budaya bahari yang telah memudar karena kekuatan kolonial dan lanskap politik dan kepentingan di masa lalu.

Untuk dapat memberikan gambaran singkat mengenai faktor-faktor pendukung dan permasalahan yang dihadapi di lapangan yang dihadapi oleh komunitas intelijen maritim untuk melakukan tugas-tugasnya, makalah ini membatasi topik pembahasan yang terutama akan fokus pada pentingnya revitalisasi budaya maritim. dan tentang fungsi dan sistem kerja intelijen maritim dalam

membantu program pengembangan kembali budaya maritim di Indonesia. Untuk mendukung argumentasi tersebut, akan disajikan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga memungkinkan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian, “Peran apa yang dapat dimainkan oleh komunitas intelijen maritim untuk membantu pemerintah dalam program penguatan budaya bahari di Indonesia dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara maritim berbentuk kepulauan yang dua pertiga wilayahnya terdiri dari perairan. Sejak zaman dahulu ada beberapa kerajaan maritim yang kuat seperti: Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Mataram dll memerintah di kepulauan Indonesia di mana budaya maritim sangat berkembang di antara masyarakatnya yang dapat mendukung kejayaan kerajaan-kerajaan itu. Tapi, kemudian kedatangan penguasa kolonial Belanda pada abad ke- 16 telah tiba-tiba mengubah wajah Indonesia dari negara maritim menjadi negara berbasis darat dengan memberlakukan pada rakyat Indonesia wajib bercocok tanam, yang panennya dinikmati oleh mereka untuk konsumsi sendiri dan berhasil memperkaya mereka melalui perdagangan global.

Dan setelah merdeka pada tahun 1945, orientasi pembangunan nasional di Indonesia yang sudah berbasis tanah belum bergeser karena mantan pemimpin nasional Indonesia masih memiliki kepentingan lebih dalam mengembangkan sektor agraria. Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 kemudian memberikan harapan baru untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Setelah diadopsinya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1982 Indonesia sejak itu diakui sebagai negara kepulauan.

Setelah pertarungan diplomatik di forum global, langkah penting lain yang perlu dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim adalah mengubah pola pikir bangsa bahwa wilayah laut Indonesia yang lebih besar dari wilayah daratannya tidak boleh diabaikan dan dilupakan. karena mengandung kekayaan laut yang melimpah yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Laut tidak boleh dianggap sebagai pemisah, melainkan sebagai pemersatu bangsa. Dan Presiden Joko Widodo telah berhasil melakukan bagian penting ini dengan menetapkan kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berbeda dengan para pendahulunya sebelumnya, ia secara tegas menyatakan pentingnya pengelolaan aset maritim dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Untuk mencapai ambisi global Indonesia, pemerintah telah menyiapkan lima pilar sebagai landasan bagi negara untuk menjadi tumpuan maritim global, yang pertama adalah membangun kembali atau merevitalisasi budaya maritim Indonesia untuk mengingatkan bangsa bahwa identitasnya, kemakmuran dan masa depan akan sangat ditentukan oleh cara negara mengelola lautnya. Sama seperti orang awam yang mungkin berpikir bahwa budaya bahari secara otomatis akan menjadi identitas bangsa Indonesia, banyak penelitian yang telah dilakukan di nusantara menemukan keberadaan budaya bahari Indonesia dalam berbagai bentuk, antara lain ritual sebelum melaut, kearifan lokal, keterampilan membuat perahu dll. Sedangkan untuk identitas maritimnya masih dipertanyakan. Ada pernyataan negatif bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut, bukan bangsa Indonesia sekarang karena saat ini sedikit generasi muda Indonesia yang ingin menjadi nelayan sebagai profesinya. Dan terkait dengan kontribusi kekayaan bahari Indonesia bagi kemakmuran rakyat Indonesia, masih jauh dari harapan ideal. Menjadi negara maritim berarti tidak hanya memiliki wilayah laut yang lebih besar dari wilayah daratannya, tetapi juga dan yang terpenting mampu menjaga dan memanfaatkannya untuk kepentingan negara di masa yang akan datang.

Sedangkan untuk revitalisasi budaya bahari, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan rencana aksi yang perlu dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan maritim dengan beberapa

kementerian dan lembaga sebagai pemangku kepentingan utamanya. Rencana aksi pertama Kebijakan Maritim Indonesia berlangsung dari 2016 hingga 2019, dan rencana aksi kedua Kebijakan Maritim Indonesia berlangsung dari 2020 hingga 2024. Sebelum kebijakan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim global diambil, perspektif maritim tampaknya tidak menjadi “isu penting” di benak masyarakat Indonesia yang tergambar dari kurangnya muatan kelautan dalam kurikulum nasional dan buku teks sejarah untuk siswa Indonesia (Wasino, 2013).

Namun demikian, Singgih Tri Sulistiyono (2017) dalam penelitiannya yang dilakukan setelah pencanangan Indonesia sebagai poros maritim dunia, masih menemukan bahwa aspek maritim belum diajarkan secara proporsional dalam mata pelajaran sejarah di sekolah menengah atas di Indonesia.

Sebagai simbol kebersamaan, semua elemen bangsa harus membantu pemerintah dalam mencari hilangnya identitas maritim dari kehidupan kontemporer bangsa Indonesia. Pendidikan, melalui pengajaran pelajaran sejarah atau pelajaran lain yang mengandung literasi budaya bahari, memegang peranan penting. Sayangnya, dan bertentangan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan poros maritim dunia menunjukkan hal lain. Konten literasi budaya bahari belum banyak mendapat perhatian dalam kurikulum dan buku teks sejarah di Indonesia (Wasino, 2013 dan Singgih Tri Sulistiyono 2017). Temuan ini sangat disayangkan mengingat peran strategis yang dapat dimainkan oleh pendidikan untuk mengubah pola pikir dan perilaku laki-laki. Namun, mengacu pada Eaton (2002) peran pendidikan dalam membentuk identitas nasional hampir tidak dipelajari secara empiris, meskipun jelas penting sekali keberadaannya.

Menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan ini, makalah ini ingin memaparkan tentang peran yang dapat dimainkan oleh komunitas intelijen untuk membantu pemerintah dalam upayanya merevitalisasi budaya maritim di Indonesia dalam upaya menjadikan negara kepulauan sebagai tumpuan maritim dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dalam pasal 4 disebutkan bahwa intelijen berperan untuk melakukan segala macam upaya deteksi dini dan peringatan dini dengan tujuan untuk mencegah, menyangkal dan memulihkan dari segala bentuk ancaman. Saat ini pemerintah Indonesia akan lebih memperhatikan aset maritim sebagai pendorong utama program pembangunan nasional, maka identitas maritim yang dianggap memudar dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda, harus diidentifikasi oleh komunitas intelijen maritim sebagai faktor pelumpuh yang dapat mengganggu pencapaian tujuan nasional di masa depan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ancaman adalah segala usaha, tugas, kegiatan dan tindakan yang berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri yang dianggap atau dapat dibuktikan membahayakan keselamatan dan keamanan bangsa, kedaulatan negara, integritas dan kepentingan nasional yang dilihat dari beberapa aspek yang berbeda; yaitu: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Keterlibatan komunitas intelijen dalam program revitalisasi budaya maritim di Indonesia masih relevan, mengingat sifat ancaman terhadap keamanan nasional kini telah berubah dari tradisional (state actor, war) menjadi non-tradisional (non-state actor, beyond war) ancaman yang cenderung multidimensi. Pergeseran ancaman dan tantangan membawa konsekuensi semakin besarnya peran intelijen sebagai garda terdepan sistem keamanan nasional.

Intelijen harus mampu mengidentifikasi segala jenis ancaman, baik yang bersifat tradisional, non-tradisional, maupun hybrid. Identifikasi ancaman dan tantangan oleh komunitas intelijen diperlukan sebagai langkah awal untuk melaksanakan tugas maksimalnya yaitu mengingatkan para pemimpin nasional sebagai penggunanya atau konsumen tentang bahaya gejolak tersebut.

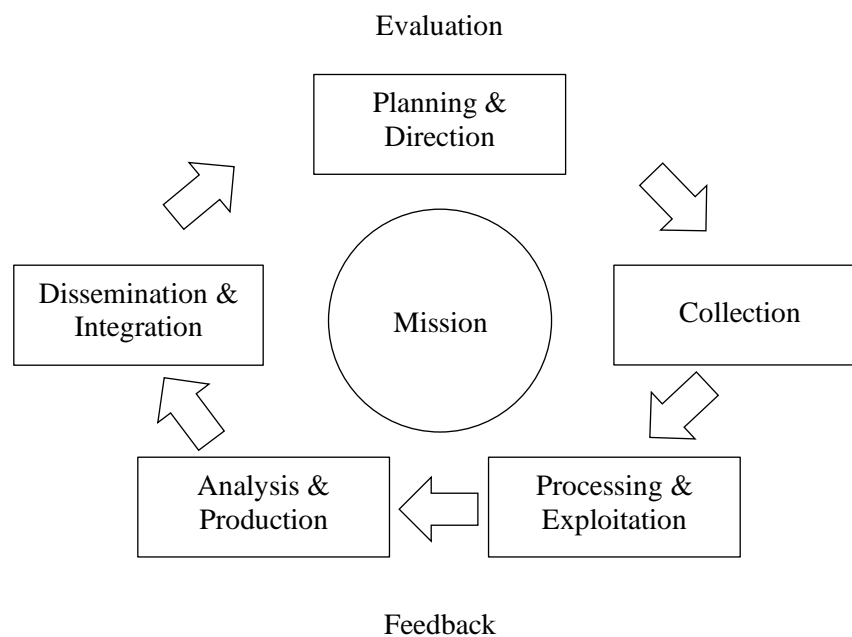
Berkenaan dengan keterlibatan intelijen, tepatnya intelijen maritim, dalam program pengembangan kembali budaya maritim Indonesia, pertama-tama perlu diketahui tentang fungsi intelijen dan cara kerjanya. Di Indonesia, intelijen memiliki tiga fungsi yang harus dilakukan, yaitu: pertama, fungsi investigasi yang biasanya dilakukan dengan mengikuti apa yang disebut dengan siklus intelijen, kedua, fungsi kontra- intelijen yang dilakukan untuk deteksi dini dan peringatan dini terhadap setiap ancaman yang akan segera terjadi untuk mencegah, menyangkal dan memulihkan dari segala kemungkinan kerusakan yang disebabkan oleh musuh yang menyusup, dan yang terakhir adalah fungsi perang psikologis dengan tujuan untuk menciptakan kondisi menguntungkan tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh pengguna. Tiga fungsi komunitas intelijen maritim sebagai berikut:



Gambar 1 Fungsi Intelijen

Sumber: dikembangkan oleh penulis dari berbagai sumber

Sementara itu, siklus intelijen yang diikuti selama investigasi yang dilakukan oleh komunitas intelijen maritim dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 2 Siklus Intelijen

Sumber: dikembangkan oleh penulis dari berbagai sumber

Dilihat dari fungsi dan sistem kerjanya, komunitas intelijen maritim dapat membantu pemerintah untuk mendukung kebangkitan budaya maritim Indonesia yang gemilang di masa lalu dengan melakukan fungsi pertamanya yaitu penyelidikan menyeluruh yang mengikuti siklus intelijen pada semua aspek kehidupan. bangsa yang perlu ditingkatkan. Pertama, pengguna atau konsumen komunitas intelijen maritim dapat merencanakan penyelidikan menyeluruh tentang hampir punahnya identitas maritim dalam kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan asumsi awal. Kemudian mereka bisa mengirimkan request ke field agent yang disebut Essential Element of Information atau EEI berkaitan dengan fenomena kekinian, misalnya, "Mengapa generasi muda di Indonesia kurang berminat bekerja di bidang maritim?". Kemudian agen lapangan akan mulai mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk dapat menjawab EEI. Agent handler akan memandu field agent dalam melakukan proses pencarian dan informasi yang diperoleh oleh field agent akan dikirimkan ke agent handler untuk diuji validitas dan reliabilitasnya melalui sistem saluran komunikasi klandestin. Setelah dianalisis dan digabungkan dengan informasi lain yang diperoleh melalui jenis intelijen lain, antara lain intelijen komunikasi, intelijen elektronik, intelijen sinyal dll, maka hasil penyelidikan secara keseluruhan akhirnya akan dilaporkan dan disebarluaskan kepada pengguna atau konsumen komunitas intelijen maritim untuk proses pengambilan keputusan dan umpan balik yang lebih baik.

Selanjutnya, pengguna atau konsumen komunitas intelijen maritim dapat menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dengan melakukan fungsi keduanya, yaitu melakukan operasi kontra intelijen yang terdiri dari empat langkah operasional: mendeteksi, menyelidiki, memanfaatkan dan meniadakan, jika diketahui adanya keterlibatan, baik langsung maupun tidak langsung, agen intelijen asing yang memperburuk keadaan. Tujuan operasi kontra-intelijen juga dimaksudkan untuk melindungi personel sendiri dari pengaruh atau campur tangan pihak asing. Atau jika tidak ada keterlibatan "orang luar", maka pelaksanaan operasi kontra intelijen dapat juga ditujukan untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dianggap tidak mendukung agenda yang ingin dibentuk, dalam hal ini revitalisasi budaya bahari. Langkah pertama operasi kontra-intelijen dilakukan untuk mengetahui petunjuk, petunjuk atau indikasi adanya jaringan agen intelijen asing yang bekerja secara sembunyi-sembunyi di dalam wilayah tersebut. Langkah kedua dimaksudkan untuk menyelidiki kenyataan atau fakta tertentu berdasarkan petunjuk, petunjuk dan indikasi yang diperoleh sehingga setelah itu agen lapangan dapat mengumpulkan bukti sebanyak yang diperlukan untuk melakukan langkah berikutnya. Kemudian langkah ketiga perlu diambil untuk menggunakan operasi klandestin lawan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin untuk pihak sendiri, dalam langkah ini, setiap agen intelijen asing yang ditangkap akan diubah menjadi agen ganda untuk mengungkap keseluruhan jaringan operasi klandestin lawan. Dan langkah keempat atau terakhir diperlukan untuk menetralkan atau menghentikan, baik secara hukum maupun ekstra-hukum, semua jaringan agen intelijen asing berdasarkan bukti dan saksi yang cukup. Tujuan operasi kontra intelijen terutama untuk deteksi dini dan peringatan dini terhadap segala kemungkinan ancaman dan tantangan yang dapat mengganggu kelancaran program pembangunan pemerintah.

Setelah berhasil menghentikan operasi jaringan agen intelijen asing di lapangan dan menegakkan hukum terhadap segala pelanggaran yang dapat membawa pengaruh buruk atau akibat buruk bagi program pembangunan kembali budaya maritim di Indonesia, akhirnya komunitas intelijen maritim dapat menjalankan fungsi ketiganya yaitu adalah mengadakan perang batin dalam rangka menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan bagi budaya bahari di Indonesia untuk mendapatkan kembali tempat dan keberadaannya dalam kehidupan berbangsa untuk mewujudkan cita-citanya menjadi poros maritim dunia. Psy war digunakan untuk mengubah pendapat, sikap, emosi dan perilaku target yang dapat dilakukan pada level strategis, level taktis dan dalam rangka mengkonsolidasikan kekuatan sendiri, baik secara persuasif maupun koersif. Perang psy dapat

menargetkan individu, kelompok, dan masyarakat tertentu. Salah satu alat yang biasa digunakan dalam psywar adalah konflik budaya yang diarahkan untuk mengubah identitas, norma dan nilai target secara bertahap sesuai dengan tema dan tujuan dari psywar. Identitas maritim bangsa dapat direvitalisasi dengan meninggalkan pesan kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya membangun kembali budaya maritim untuk mendukung negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salah satu dari sekian banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan melakukan psywar adalah mengurangi kehilangan personel dan peralatan sendiri karena kondisi psikologis musuhlah yang coba dipengaruhi. Seperti yang dikatakan Sun Tzu bahwa seni tertinggi dalam pertempuran adalah menaklukkan musuh tanpa mengadakan perang.

Karena produk intelijen semata-mata ditujukan untuk pengguna atau konsumen saja dan bukan untuk konsumsi publik, maka artikel ini ingin memaparkan beberapa temuan dari studi pustaka (yang dapat diasah atau ditindaklanjuti oleh komunitas intelijen maritim) mengenai situasi yang kurang menguntungkan untuk merevitalisasi budaya maritim di Indonesia. Indonesia, sebagai berikut:

Pertama, ada kesalahan doktrinal mendasar yang telah ditanamkan pada masyarakat Indonesia sejak pertama kali, bahwa Indonesia sebagian besar adalah negara agraris. Walaupun tidak sepenuhnya salah, namun jika indoktrinasi ini terus berlanjut maka secara tidak langsung akan menimbulkan paradigma yang salah bahwa bangsa Indonesia berjiwa agraris dan akan semakin menurunkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim yang sebenarnya bisa hidup dari hasil laut, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi juga untuk diekspor sebagai komoditas yang menguntungkan.

Kedua, meskipun begitu banyak upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun bagaimanapun juga temuan menunjukkan bahwa muatan kelautan belum cukup berkembang dalam kurikulum dan buku teks sejarah untuk pelajar Indonesia. Temuan tersebut bertentangan dengan salah satu dari tiga dimensi prinsip pembangunan nasional, yaitu pembangunan dimensi manusia yang bertumpu pada pendidikan, kesehatan, perumahan dan mental atau karakter.

Ketiga, warisan maritim bawah laut (BMKT) yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang budaya maritim di Indonesia cenderung lebih dianggap sebagai "barang ekonomi" daripada sebagai "barang budaya" sehingga menjadi rebutan antara kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia (Supratikno Rahardjo, 2019), terutama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan yang membawahi Direktorat Konservasi Cagar Budaya dan Museum dan Komite Nasional Penyelamatan dan Pemanfaatan Benda Berharga dari Kapal Tenggelam (VOS), diketahui sebagai PANNAS-BMKT (NCSU-VOS). Jika kondisi ini dilihat dari sudut pandang intelijen, itu dianggap sebagai titik rapuh yang mungkin dimanfaatkan oleh musuh untuk membubarkan persatuan kita sebagai bangsa untuk mencapai niat jahat mereka dan memaksimalkan keunggulan mereka. Oleh karena itu, masalah ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Keempat, meskipun pemerintah Indonesia telah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejalan dengan ambisi globalnya, namun keberadaan intelijen maritim masih dipertanyakan. Dalam kerangka hukum yang ada, intelijen maritim belum diakui sebagai bagian dari intelijen negara. Mungkin orang awam akan mempertimbangkan bahwa kegiatan intelijen maritim dapat dilakukan oleh intelijen kementerian atau non-kementerian yang sudah diakui oleh hukum nasional. Sebaliknya, cakupan intelijen maritim lebih besar daripada intelijen kementerian atau non-kementerian dan pengguna atau konsumennya mungkin berasal dari berbagai pemangku kepentingan yang berbeda di domain maritim.

Karena intelijen maritim tidak diakui secara formal di Indonesia dalam peraturan yang ada, maka pentingnya perannya saat ini dimainkan oleh beberapa pihak kementerian dan lembaga negara.

Namun, kami melihat bahwa sangat penting untuk membentuk badan intelijen maritim tertentu di Indonesia, tidak hanya karena peran strategisnya yang dapat dimainkan seperti tersebut di atas, tetapi juga karena alasan lain, yaitu akuntabilitas anggaran negara. Kita semua tahu bahwa segala kegiatan yang dibiayai oleh APBN yang sebelumnya digalang antara lain dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh warga negara, harus dipertanggungjawabkan di hadapan wakil rakyat. Dan jika anggaran negara yang telah dialokasikan ke beberapa kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk angkatan laut dan polisi laut digunakan antara lain untuk mendanai kegiatan intelijen maritim, maka akan semakin sulit bagi kementerian dan lembaga tersebut untuk dimintai pertanggungjawabannya. penggunaan anggaran negara, karena kementerian dan lembaga tersebut tidak memiliki tugas khusus dalam melaksanakan kegiatan intelijen maritim. Parahnya lagi, kementerian dan lembaga tersebut akan dianggap melanggar aturan penggunaan anggaran negara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, untuk membahas lebih jauh keterlibatan komunitas intelijen maritim dalam program revitalisasi budaya maritim di Indonesia, langkah awal yang harus dilakukan adalah mendorong legislatif untuk mengubah regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, sehingga akan mudah mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan pendataan intelijen maritim. Selain itu, amandemen undang-undang tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap komunitas intelijen maritim Indonesia yang sebenarnya telah ada.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya melakukan segala upaya deteksi dini dan peringatan dini dengan tujuan untuk mencegah, menolak dan memulihkan dari segala bentuk ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. , komunitas intelijen maritim di negara kepulauan, melalui pelaksanaan fungsi dan sistem kerjanya, dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan memudarnya budaya maritim yang dianggap sebagai faktor pelumpuh untuk menjadikan bangsa sebagai poros maritim dunia. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada lembaga legislatif di Indonesia untuk mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara agar tercipta lembaga intelijen maritim yang unik dan khas sebagai bagian dari intelijen negara, di bawah koordinasi Badan Intelijen Negara (BIN). Selanjutnya, lembaga yang baru dibentuk itu akan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan intelijen maritim yang selama ini dilakukan secara implisit oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk angkatan laut dan polisi laut, yang dianggap tidak efektif dan dapat melanggar undang-undang tentang pengelolaan anggaran negara. Selain itu, amandemen tersebut merupakan salah satu bentuk pengakuan formal atas keberadaan komunitas intelijen maritim yang dapat membantu pemerintah dalam membangun kembali budaya maritim sebagai salah satu dari lima pilar utama yang mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles G. Levine, James Côté, Identitas, Formasi, Agensi, dan Budaya: Sintesis Psikologis Sosial, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2002
- Hapidin, Nurbiana Dhieni dan Yuli Pujiarti, Perspektif Pendidikan Transformatif: The Literasi Budaya Maritim Masyarakat Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Indonesia, ICELS, 2019 <https://carla.umn.edu/culture/definitions.html>
<http://maritimnews.com/2016/02/ini-pandangan-para-pakar-mengenai-intelijen-maritim/>
- Hüsamettin naç, Feyzullah nal, Konstruksi Identitas Nasional di Zaman Modern: Perspektif Teoretis, Jurnal Internasional Humaniora dan Ilmu Sosial, 2013
- JS Phinney, Sebuah model tiga tahap perkembangan identitas etnis pada masa remaja, New York: State University of New York Press, 1993.
- Melinda A. Kambey, Djuwita RR Aling, Christian R. Dien, Eksistensi Budaya Kelompok Nelayan Maritim

Kelurahan Malalayang Duo, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, *Akulturasi_jurnal ilmiah agrobisnis perikanan*, Vol. 8 No. 1 (April 2020), p-ISSN. 2337-4195 /e-ISSN: 2685-4759;

Multamia RMT Lauder dan Allan F. Lauder, *Maritime Indonesia and the Archipelagic Outlook*, Wacana, 2017

Oktavianus, *Bahasa dan Budaya Maritim: Identitas dan Pemer kaya Budaya Bangsa*, Pustaka, 2019

Panduan Implementasi Kurikulum Kemaritiman, Balibang Kemdikbud, Pusat Kurikulum dan Buku, 2017

Singgih Tri Sulistiyono, *Menelusuri Peran Pendidikan dalam Mempertahankan Identitas Bangsa: Aspek Kelautan dalam Mata Pelajaran Sejarah di SMA se-Indonesia*, *Journal of Kajian Maritim dan Integrasi Nasional*, 2017

Sumarno, Wisnu, Rojil Nugroho Bayu Aji, *Budidaya di Hindia Belanda*, 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018).

Supratikno Rahardjo, *Konvensi Internasional vs Kepentingan Nasional: Kontestasi Antar Instansi Pemerintah Indonesia tentang Pelestarian Cagar Budaya Bawah Laut*, *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 2019

Supratikno Rahardjo, Nies Anggraeni, dkk, *Warisan Budaya Maritim Nusantara*, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Ditjen Kebudayaan, Kemdikbud, 2018

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Wasino, *Budaya Bahari dalam Kurikulum dan Buku Ajar Sejarah Indonesia, Pengembangan dan Alternatif Solusi*, Universitas Negeri Semarang, 2013.